

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pemerintah adalah entitas pelapor (*Reporting Entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap

kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) Terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang

baik. (*Good Government Governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti berikut :

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun

waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun.

Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. Pada pemeriksaan kali ini, pemerintah kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. (Muhammad Ibnu S, <http://www.pikiran-rakyat.com/>)

Kota Bandung menjadi satu dari empat pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terkait laporan keuangannya. Adapun sebelas pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemprov Jabar, sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, kepada 12 pemerintah daerah di Kantor BPK Provinsi Jabar, yaitu "Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Bandung masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP)," kata Kepala Perwakilan Provinsi Jabar, Arman Syifa.

Menurut Arman, ada sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik. Di antaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset

tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemda setempat. Selanjutnya, Arman mengatakan, sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. "Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (action plan)," ucap Arman. Arman menambahkan, ada lima Pemda berhasil mempertahankan opini WTP, di antaranya Kota Depok, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Pemda baru pertama kali menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi. (Andrian Salam Wiyono, <https://www.merdeka.com/>)

Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah aset, Emil mengaku sudah membentuk tim percepatan aset yang akan mengurus kejelasan aset di Kota Bandung. Tahun ini, pihaknya pun menargetkan 100 aset untuk diselesaikan sertifikasinya.

Menurut Cornell, beberapa hal yang menjadi kendala Pemda untuk meraih WTP di antaranya yakni terkait masalah Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial.

"Selain itu, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, dan ada juga penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih menjadi pengecualian bagi banyak Pemda," bebernya. (Annisa Putri, <https://news.detik.com/>)

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (*Hardware* dan *Software*) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2010 : 71).

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadi kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2012 : 28).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2009).

Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini

yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian internal yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh suatu organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan dan non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2013 : 18). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) Keandalan Laporan Keuangan; (c) Pengamanan aset negara; dan (d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*Scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*Watch*) juga

mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 537 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2017 menemukan 6.053 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1

Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan.	2.156
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.	2.657
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.	1.240
	Jumlah	6.053

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I 2017

BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.525 kasus yang meliputi belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/barang, pembayaran

honorarium ganda dan/ melebihi standar, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/barang, dan kerugian lainnya dengan total kerugian sebanyak 1,13 triliun.

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari tahun 2012-2016. BPK memberikan opini *Unqualified* atau *Qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2012-2016 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin meningkat, wajar dengan pengecualian (WDP) tidak memiliki banyak perubahan, tidak memberikan pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun, bahkan opini tidak wajar (TW) terjadi kenaikan . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

LKPD (Tahun)	Opini			
	WTP %	WDP %	TMP %	TW %
2012	23%	61%	15%	1%
2013	30%	59%	9%	2%
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	35%	6%	1%
2016	70%	26%	4%	0%

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I 2017

Masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, ada penambahan satu faktor yang mungkin

memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan sebesar 83%. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen peneliti hanya meneliti Sistem Pengendalian Intern, sedangkan penulis menambahkan variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen. Penulis meneliti

tentang pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti meneliti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian perbedaan lainnya adalah peneliti meneliti di SKPD Kota Depok, sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survey Pada Pemerintah Kota Bandung)”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan sistem pengendalian internal pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

4. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimanakah Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung secara simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai konsep-konsep pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dalam instansi pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung. Yang beralamat Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Tlp [0622\) 24234793](tel:062224234793).